

# BPK Ancam

# Laporkan Pemda

## ■ Hanya 50 Persen Temuan Ditindaklanjuti

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Ir Adi Sudibyo MM mengatakan dari sekitar 4.000 temuan baru sekitar 50 persen yang ditindaklanjuti pemerintah daerah di 14 kota/kabupaten dan provinsi. Untuk memberikan efek jera, ke depan pihaknya akan melaporkan ke penegak hukum.

"Selama ini memang kita belum mengambil langkah apapun setiap temuan yang tidak ditindaklanjuti. Tahun ini, temuan akan kita laporkan kepada penegak hukum. Selama ini kita masih memandang hal ini bisa diselesaikan pemerintah daerah masing-masing," ujar Adi Sudibyo kepada *Tribun* usai acara ramah tamah BPK RI Provinsi Kalbar dengan



TRIBUN/RHO

” Kalau dalam batas waktu selama 30 hari mendatang, pemerintah kabupaten/kota tidak memperbaiki itu, maka akan kami serahkan pada penegak hukum. ”

### ADI SUDIBYO

Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat

Pers di Hotel Mercure, Senin (21/2).

Dikatakannya, BPK RI akan melaksanakan ini pada tahun anggaran 2011. Untuk itu pihaknya sedang menyiapkan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan beserta turunannya kepada Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Inspektorat di seluruh Kabupaten/Kota serta Provinsi di Kalbar.

"Kalau dalam batas waktu

selama 30 hari mendatang, pemerintah kabupaten/kota tidak memperbaiki itu, maka akan kami serahkan pada penegak hukum," tegas Adi Sudibyo.

Dijelaskan hingga kini tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang sesuai oleh pemerintah daerah masih sedikit yakni 47 persen dari 4.313 rekomendasi dari tahun 2004 sampai semester II 2010. "Hampir separuh saja rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut," katanya.

Dari 15 entitas di Kalbar yang dipantau BPK RI, hanya tiga yang prestasinya baik dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yakni Kabupaten Sambas (83 persen), Landak (74 persen) dan Pemerintah Kota Singkawang (73 persen). Ia tidak memungkiri masih banyak yang belum mencapai 50 persen, malah ada yang di bawah itu.

• Selama kurun waktu ter-

■ Bersambung ke Hal 15

**news analysis**

Ferrys Zainudin

Dosen Hukum Pidana

## Sita Aset Koruptor

LANGKAH yang dilakukan BPK sebagai terobasan maju dalam dunia hukum. Rencana tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

BPK sebenarnya tak perlu segan melaporkan temuan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun kejaksaan. Jika memang BPK benar-benar mau mengeksekusi rencananya tersebut, maka Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPA-TK) harus dilibatkan agar bisa bersinergi mendalami temuan.

Mekanisme yang terbaik

bagi BPK sebagai lembaga pengawas keuangan daerah maupun nondaerah, terlebih dahulu harus memberikan opsi terhadap temuan-temuan yang diduga mencurigakan tersebut. Dari opsi tersebut nantinya bisa menentukan temuan mana yang termasuk kejahatan. Laporkan segera ke polisi, kejaksaan, kalau perlu ke KPK untuk temuan yang sulit diungkap dan kategori kakap.

Manfaat pelaporan tersebut bisa mendapatkan efek jera bagi para pelaku. Efek jera

■ Bersambung ke Hal 15

### Temuan 2010

- Rekomendasi se Kalbar 4.313
- Terdapat 2.144 temuan
- Tindaklanjuti oleh Pemda 47 persen
- Tiga berprestasi baik: Sambas, Landak, Singkawang

sebut, terdapat 2.144 temuan dan 4.313 rekomendasi dari BPK RI Kalbar terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sebanyak 2.047 rekomendasi sudah sesuai dengan tindak lanjut. Sedangkan 1.299 rekomendasi belum sesuai tindak lanjut, 967 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

"Besok kita akan sosialisasi mengenai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010. Tahun 2011 ini harus dilaksanakan. Sejauh ini tiga peringkat teratas dalam menindaklanjuti setiap temuan yakni Kabupaten Singkawang, Sambas, dan Sanggau. Sementara tiga terendah di antaranya Kabupaten Melawi. Kita akan lakukan *mapping* untuk mengetahui kelemahan-kelemahan Inspektorat dalam hal tindak lanjut temuan BPK RI ada dimana," jelasnya.

Selain itu, pada tahun ini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar akan melakukan pemeriksaan berbasis kinerja dengan dua entitas, yaitu aset dan infrastruktur. Ini dilakukan pada semester kedua, sementara semester pertama masih difokuskan dalam laporan keuangan APBD. "Untuk infrastruktur ada lima daerah, Kapuas Hulu, KKR, Sambas, Sang-

gau, dan Provinsi Kalbar sendiri," ungkapnya.

## Dokumen Publik

Dalam ramah tamah ini, media mengeluhkan keengganan Pemerintah Daerah serta DPRD membuka setiap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang pelaksanaan APBD di setiap kabupaten/kota. Adi Sudibyo mengakui hal itu dan untuk itu pihaknya siap menjembatani permasalahan media sebagai bentuk komitmen transparansi publik dan untuk membangun Indonesia, khususnya Kalbar menjadi lebih baik.

"Seharusnya setelah BPK RI menyerahkan LHP APBD ke DPRD dan Pemerintah Daerah, itu menjadi dokumen publik. Tapi Pemkab dan DPRD malah membalikan ke kita, BPK RI melarang untuk diberikan. Sebenarnya itu tidak benar, kita siap memberikan setiap informasi kepada rekan-rekan media. Silakan datang ke kantor dan ajukan permohonan, kita selalu siap dengan tersenyum," kata Kasub Auditoriat Kalbar I, Herold Fery Malxawimbang.

## Bukan Masalah Seri

Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaporkan beberapa temuan yang mencurigakan ke aparat pene-

gak hukum, ditanggapi datar Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Menurutnya jika rencana tersebut merupakan sebuah prosedur yang biasa, ia menanggapinya bukan sebuah masalah serius yang menjadi beban aparturnya.

"Yang penting dari semua itu kita harus melihat prosesnya. Sebab, sebagian besar dari temuan dari tahun 2009 ke belakang dan beberapa temuan sudah ditindak," ungkapnya saat dihubungi melalui ponsel, Senin (21/2) malam.

Sutarmidji juga menambahkan jika rencana tersebut bukanlah ancaman dan hambatan bagi aparatnya dalam menjalankan tugas melayani publik. Dirinya menjamin semua

akan berjalan seperti biasanya. Ia malah memuji langkah BPK RI tersebut sebagai upaya untuk meperlancar kinerja bawahannya dan menjauhkan dari penyelewengan. Kota Pontianak dalam rilis BPK menyatakan masih didapati beberapa temuan yang mencurigakan merugikan keuangan negara.

Terkait dengan laporan keuangan 2011 nantinya, Sutarmidji secara teknis menyerahkan sepenuhnya kepada aparatnya yang memang berwenang untuk menyusunnya. "Semua itu ada bagiannya yang mengatur, namun jika itu berkaitan dengan administratif atau prosedural maka itu menjadi wewenang saya," kata Sutarmidji. (rhd/rzk)

# Sita Aset Koruptor

sendiri terbagi atas dua bagian, internal dan eksternal. Internal dapat diartikan sebagai efek rasa takut dari dalam lingkungan instansi yang bersangkutan, termasuk staf dan pimpinan untuk tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Sedangkan efek eksternal bisa diartikan sebagai *warning* dan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak

berbuat penyelewengan.

Saya mendukung upaya BPK atau lembaga lainnya untuk melakukan penyitaan aset yang merupakan hasil dari tindakan kriminal, termasuk korupsi. Hal ini bukan upaya pemiskinan para koruptor, tetapi upaya mengembalikan pelaku tindakan penyelewengan dana negara kembali ke bentuknya yang semula. (rzk)